



Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Klasifikasi Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Grace Natalia Timang Pasulu¹, Made Dwi Setyadhi Mustika²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali

Korespondensi penulis: gracepasulu1130@gmail.com

Abstract: *Inequality in income distribution between regions is a persistent structural problem in Indonesia's economic development, including in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Differences in the quality of Human Resources (HR), investment intensity, economic growth, unemployment rates, and minimum wages in each region lead to imbalances in welfare attainment. DIY even recorded the highest Gini index in Indonesia as of March 2024, indicating the most severe level of inequality nationally. This study aims to analyze the simultaneous and partial effects of HR quality, investment, economic growth, unemployment rates, and minimum wages on inter-regional income inequality in DIY Province. In addition, this study also classifies five regencies/cities in DIY into a regional growth typology based on the Klassen Typology approach, which combines indicators of economic growth and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita. The type of data used is secondary panel data from the five regencies/cities during 2014–2023, obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis method used is multiple linear regression with the help of SPSS software, and is complemented by classical assumption testing and Klassen Typology analysis. This research design is quantitative descriptive and associative, with a data-driven empirical approach. The results of the study indicate that simultaneously all five variables have a significant effect on income distribution inequality, but partially only human resource quality has a positive and significant effect. Regional classification based on Klassen Typology places Yogyakarta and Sleman as developed regions, while Bantul and Gunungkidul are classified as underdeveloped. The implications of this study show the importance of an inclusive and region-based development policy direction. Regional governments need to prioritize improving human resource quality through education and health.*

Keywords: *human resource quality, inequality, klassen typology*

Abstrak. Ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan permasalahan struktural yang terus berlangsung dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perbedaan kapasitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), intensitas investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan besaran upah minimum di masing-masing wilayah menyebabkan ketidakseimbangan dalam pencapaian kesejahteraan. DIY bahkan tercatat memiliki indeks Gini tertinggi di Indonesia per Maret 2024, menunjukkan tingkat ketimpangan yang paling parah secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial dari variabel kualitas SDM, investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi DIY. Selain itu, penelitian ini juga mengklasifikasikan lima kabupaten/kota di DIY ke dalam tipologi pertumbuhan wilayah berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen, yang menggabungkan indikator pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder panel dari lima kabupaten/kota selama tahun 2014–2023, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, dan dilengkapi dengan pengujian asumsi klasik dan analisis Tipologi Klassen. Desain penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan asosiatif, dengan pendekatan empiris berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, namun secara parsial hanya kualitas SDM yang berpengaruh positif dan signifikan. Klasifikasi wilayah berdasarkan Tipologi Klassen menempatkan Yogyakarta dan Sleman sebagai daerah maju, sementara Bantul dan Gunungkidul tergolong tertinggal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berbasis wilayah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan Kesehatan.

Kata kunci: ketimpangan, kualitas SDM, tipologi klassen

1. LATAR BELAKANG

Secara umum, pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan mendorong transformasi struktural yang menysar peningkatan kualitas kehidupan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan aspirasi setiap individu secara manusiawi (Raafi'i et al., 2018). Dalam pandangan Sukirno, (2002), Pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses jangka panjang yang mendorong peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu masyarakat secara terus menerus. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi yang lebih maju, serta penurunan ketimpangan pendapatan baik individu, wilayah, maupun sektor-sektor ekonomi.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mendorong terjadinya pertumbuhan yang maksimal, sekaligus mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan angka pengangguran (Arsyad, 1999). Pembangunan tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, peran lembaga-lembaga nasional, ketimpangan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat tercermin dari peningkatan konsumsi yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, maupun pengangguran. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap individu dan meningkatkan kualitas hidup dengan cara meningkatkan standar hidup masyarakat yang tidak hanya diukur dari segi materi (Todaro & Smith, 2006).

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat dinilai dari tercapainya tingkat ekonomi yang tinggi serta tercapainya distribusi pendapatan yang merata. Kedua indikator ini harus dicapai secara serentak dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi (Santosa, 2015). Jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh pemerataan yang memadai, maka akan muncul kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antarwilayah, yang pada gilirannya akan memperbesar ketimpangan regional di antara wilayah-wilayah tersebut (Cita, 2016). Pertumbuhan berkaitan erat dengan ketimpangan, hal ini diperkenalkan oleh Kuznet pada tahun 1955. Menurut Kuznet 1973 dalam Pratiwi (2021), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam memproduksi barang-barang ekonomi guna memenuhi kebutuhan penduduknya. Berdasarkan pandangan Kuznets, pada fase

awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung mengalami kemerosotan, sehingga tingkat ketimpangan meningkat. Proses ini akan terus berlangsung hingga ketimpangan mencapai titik tertinggi, lalu secara bertahap menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Pandangan tersebut dikenal dengan Hipotesis Kuznets, yang mengilustrasikan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kurva U terbalik.

Pada tahap awal pembangunan, ekonomi cenderung berpusat pada sektor modern dan berfokus pada wilayah yang lebih maju. Artinya, pertumbuhan di daerah akan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang sedang berkembang. Ketimpangan yang terjadi pada daerah yang relatif tertinggal dengan daerah yang relatif maju merupakan imbas dari akibat industrialisasi dan perubahan struktur ekonomi, sehingga pihak swasta ataupun pemerintah cenderung melakukan investasi kepada daerah yang relatif maju (Ryansyah et al., 2023). Menurut Sjafrizal (2017) struktur dan pola letak, serta konsentrasi atau pemusatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah, merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan adanya perbedaan ekonomi antarwilayah. Penyebaran kegiatan ekonomi antarwilayah dapat mempengaruhi keunggulan masing-masing daerah, yang pada akhirnya mengarah pada pemusatan serta penentuan struktur dan pola ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai upaya untuk mengurangi ketimpangan dapat menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif di masa depan (Syaifullah & Sari, 2021).

Terdapat dua ketimpangan yang menjadi pusat perhatian menurut Kuncoro (2012), pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, yang diukur melalui Indeks Gini serta proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh 40% kelompok berpendapatan rendah. Kedua, ketimpangan antarwilayah, yang perlu mendapat perhatian karena aktivitas ekonomi di Indonesia secara geografis cenderung terpusat di wilayah Barat. Ketimpangan distribusi pendapatan merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidaksamaan dalam jumlah pendapatan yang diperoleh antarindividu dalam suatu populasi (Suryani & Woyanti, 2021). Salah satu indikator yang sering digunakan dalam literatur untuk menilai tingkat ketimpangan ini adalah Rasio Gini.

Ketimpangan memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari ketimpangan adalah mendorong wilayah-wilayah yang kurang berkembang untuk berupaya meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonominya dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan (Tyas, 2017). Sementara itu, dampak negatif dari ketimpangan adalah munculnya konflik sosial, yang sulit dihindari akibat tidak optimalnya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output nasional terhadap seluruh lapisan masyarakat Kakwan

dan Pernia dalam Attibrizi (2016). Terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah, maupun antarwilayah satu dengan yang lain merupakan fenomena yang umum terjadi. Secara makro, ketimpangan pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan dalam distribusi sumber daya, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan teknologi, serta modal (Raharti et al., 2021). Munculnya ketimpangan ini juga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah serta memengaruhi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah (Zasriati, 2022).

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut juga dihadapi oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya dan memiliki potensi daerah yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Perbedaan karakteristik seperti letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di setiap wilayahnya berpengaruh kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pola pembangunannya tidak sama dan menyebabkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan perkapita, dan ketimpangan pembangunan (Yuliani, 2018).

Salah satu alat ukur yang umum dipakai untuk menilai distribusi pendapatan adalah rasio Gini, yang juga dikenal dengan istilah indeks Gini atau rasio konsentrasi Gini. Indeks ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan. Cara perhitungannya adalah dengan mengukur luas area di antara garis diagonal yang melambangkan pemerataan sempurna dan kurva Lorenz, lalu membandingkannya dengan luas setengah dari bujursangkar tempat kurva Lorenz tersebut berada. (Lincoln Arsyad, 2010). Rasio Gini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi berdampak merata pada masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria ketimpangan berdasarkan nilai koefisien Gini dibagi sebagai berikut: apabila koefisien lebih dari 0,5, maka ketimpangan dikategorikan tinggi; jika berada antara 0,3 hingga 0,5, ketimpangan tergolong sedang; dan jika kurang dari 0,3, maka ketimpangan dianggap rendah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,379. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori ketimpangan sedang berdasarkan kriteria Koefisien Gini. Data rasio Gini menurut provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti berbagai faktor penyebab ketimpangan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan ketimpangan adalah kualitas SDM yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian yang dilakukan

oleh Azim et al., (2022) tentang determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya semakin tinggi nilai IPM, semakin kecil ketimpangan yang terjadi.

Selanjutnya, faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan adalah investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sinik dan Robertus (2023), investasi ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan, sehingga baik PMA maupun PMDN yang meningkat akan menurunkan ketimpangan wilayah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Penelitian yang dilakukan oleh Sinik dan Robertus, (2023), Yusica et al., (2018), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan ketimpangan wilayah. Febriyani dan Anis (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan et al., menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin et al., (2021) menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa, sejalan dengan itu Yusica et al., (2018) yang juga menggunakan variabel tingkat pengangguran untuk untuk menguji ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan di provinsi tersebut. Artinya, apabila tingkat pengangguran naik dapat menyebabkan ketimpangan.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Istikharoh et al., (2018), menemukan bahwa upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Windari (2023), Katon Prasetyo Wibowo dan Pangestuty (2023) menjelaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian ini, pendekatan Tipologi Klassen juga digunakan untuk memberikan gambaran ketimpangan secara lebih nyata. Tipologi Klassen digunakan sebagai alat analisis untuk mengelompokkan dua wilayah berdasarkan dua indikator utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita suatu wilayah (Sondakh, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan, yang didukung oleh temuan-temuan dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan fokus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Klasifikasi Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan sejumlah variabel ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang diteliti mencakup ketimpangan sebagai variabel terikat, serta kualitas SDM, investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan upah minimum sebagai variabel bebas. Data yang digunakan merupakan data panel gabungan dari lima kabupaten/kota selama periode 2014–2023, sehingga diperoleh 50 unit observasi. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti publikasi Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, dan laporan pemerintah yang relevan (Sugiyono, 2017; Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan terhadap data sekunder yang telah tersedia, tanpa melibatkan partisipasi langsung dari peneliti di lapangan. Teknik analisis yang digunakan mencakup analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum, dan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap ketimpangan. Selain itu, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi turut dilakukan guna memastikan validitas model regresi yang digunakan (Ghozali, 2018; Purba et al., 2021).

Penelitian ini juga menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk memetakan karakteristik dan tingkat kemajuan masing-masing kabupaten/kota di Yogyakarta berdasarkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil klasifikasi wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai ketimpangan yang terjadi, apakah berada pada kategori daerah maju, berkembang cepat, tertinggal, atau maju namun tertekan. Pendekatan ini penting untuk merancang strategi kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran dalam mengurangi ketimpangan (Iskandar & Saragih, 2018; Sjafrizal, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	C			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketimpangan	50	.296	.516	.39416	.046674
Kualitas SDM	50	67.03	88.61	78.3946	6.40389
Ln Investasi	50	25.78	31.58	28.1035	1.43388
Pertumbuhan Ekonomi	50	.98	9.16	3.7780	1.83061
Pengangguran	50	6.45	12.11	9.4654	1.63550
Ln Upah Minimum	50	20.71	21.57	21.1737	.22196

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 50 data observasi, diketahui bahwa variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks rasio gini memiliki nilai minimum sebesar 0.296 dan nilai maksimum sebesar 0.516 dengan rata-rata sebesar 0.394 dan nilai standar deviasi sebesar 0.046 sehingga menunjukkan bahwa variasi ketimpangan distribusi pendapatan relatif tidak terlalu besar.

Variabel kualitas SDM menunjukkan nilai minimum 67.03 dan nilai maksimum 88.61. Nilai rata-rata sebesar 78.39 dengan standar deviasi sebesar 6.40. Meskipun secara statistik nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM tidak terlalu bervariasi.

Variabel Investasi diukur dalam bentuk Logaritma natural (Ln) untuk mengatasi skala data yang terlalu besar. Variabel investasi memiliki nilai minimum 25.78 dan nilai maksimum sebesar 31.58. Nilai rata-rata sebesar 28.1 dengan standar deviasi sebesar 1.43. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai investasi relatif tidak terlalu bervariasi.

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 0.98 dan nilai maksimum sebesar 9.16. Nilai rata-rata sebesar 3.7780 dengan standar deviasi 1.83061. Standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bervariasi. Meskipun standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, namun rentang nilai pertumbuhan ekonomi (0.98- 9.16) menunjukkan perbedaan yang cukup lebar sehingga secara substansi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi cukup bervariasi.

Variabel pengangguran memiliki nilai minimum sebesar 6.45 dan maksimum sebesar 12.11. Nilai rata-rata sebesar 9.4654 dengan standar deviasi sebesar 1.63550. Standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak terlalu bervariasi. Meskipun standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata, namun rentang nilai tingkat

pengangguran (6.45-12.11) menunjukkan perbedaan yang cukup lebar sehingga secara substansi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi cukup bervariasi.

Variabel upah minimum diukur dengan Logaritma natural (Ln) untuk mengatasi skala data yang terlalu besar. Variabel upah minimum memiliki nilai minimum sebesar 20.71 dan maksimum sebesar 21.57. Nilai rata-rata sebesar 21.1737, dengan standar deviasi sebesar 0.22196. Nilai standar deviasi yang sangat kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa nilai upah minimum relatif seragam dan tidak cukup bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan. Asumsi klasik yang diuji meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas

- Jika signifikansinya $\alpha > 0,05$, residual berdistribusi normal
- Jika signifikansinya $\alpha \leq 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.94760708
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.096
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.679
Asymp. Sig. (2-tailed)		.746

Sumber: Data diolah, 2025

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas, yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.746. Karena p-value lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kualitas SDM	.260	3.844
Ln Investasi	.655	1.528
Pertumbuhan Ekonomi	.834	1.199
Pengangguran	.299	3.342
Ln Upah Minimum	.792	1.263

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Semua nilai VIF bernilai <10 dan nilai tolerance >0.10

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan lain. Persamaan regresi dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas

- 1) Jika nilai signifikansinya $\leq 0,05$, berarti terdapat heteroskedastisitas
- 2) Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sum of Squares	ofdf	Mean Square	F	Sig.
Regression	.002	5	.000	1.187	.331 ^b
Residual	.012	44	.000		
Total	.013	49			

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 Nilai signifikansi sebesar 0.331 $> 0,05$, menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 Berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
	.846 ^a	.716	.684	.026239

Sumber: Data diolah, 2025

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,684 atau sebesar 68,4% yang artinya 68,4% ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variabel kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum sedangkan sisanya yaitu 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada diteliti dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis

Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Pengaruh Simulttan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.076	5	.015	22.210	.000 ^b
Residual	.030	44	.001		
Total	.107	49			

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 hasil uji menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 22.210 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0.000 < 0.05$) yang artinya model dalam penelitian ini layak. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ ($0.000 < 0.05$) dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.281	.396		-.710	.481
Kualitas SDM (X1)	.006	.001	.825	5.239	.000
Ln Investasi (X2)	-.002	.003	-.061	-.616	.541
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	.000	.001	.008	.088	.930
Pengangguran (X4)	.001	.004	.035	.242	.810
Ln Upah Minimum (X5)	.012	.019	.057	.637	.528

Sumber: Data diolah 2025

- Pengaruh kualitas SDM terhadap Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Nilai signifikansi Variabel Kualitas SDM sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.000 < 0.05$) yang berarti H_0 ditolak. Sehingga, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0.541. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.541 > 0.05$) yang berarti H_0 diterima. Sehingga variabel investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nilai signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.930. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.930 > 0.05$) yang berarti H_0 diterima. Sehingga, variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nilai signifikansi variabel pengangguran sebesar 0.810. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.810 > 0.05$) yang berarti H_0 diterima. Sehingga, variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nilai signifikansi variabel Upah Minimum sebesar 0.528. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.528 > 0.05$) yang berarti H_0 diterima. Sehingga, Variabel Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini (Tabel 6) menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh secara simultan (uji F) terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung yang bernilai 22.210 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai signifikansi sebesar 0.000 tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kombinasi dari keempat faktor tersebut secara simultan berperan penting dalam memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zusanti et al (2020) yang menganalisis faktor-faktor ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh secara simultan variabel-variabel tersebut terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini juga didukung oleh penelitian milik Julihanza & Khoirudin (2023) tentang determinan ketimpangan di seluruh provinsi di Sumatera dengan variabel penelitian, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Inflasi dan Investasi. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Pengaruh secara parsial

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis secara parsial yang dilakukan dalam penelitian ini (Tabel 7) menunjukkan arah dan pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut.

- Pengaruh kualitas SDM Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel kualitas SDM terhadap Ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t hitung sebesar 5.239 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (<0.05). Hasil uji ini menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hasil ini secara statistik menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM dengan IPM sebagai indikatornya, di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifudin et al., (2024). Dalam penelitian tersebut hasil uji pengaruh parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan di Indonesia tahun 2012-2022 ditemukan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena berdasarkan teori pembangunan manusia yang mengutamakan pentingnya pendidikan, kesehatan, pendapatan dan distribusi sumber daya, apabila hal tersebut tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah maka akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Meskipun kualitas SDM yang diwakili oleh angka IPM di suatu wilayah tinggi, hal itu tidak serta merta menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat di dalam wilayah tersebut telah menikmati akses dan manfaat secara merata. Sebagai indikator rata-rata, IPM memiliki keterbatasan karena tidak merepresentasikan kesenjangan antargolongan masyarakat di dalam suatu wilayah. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan bisa tetap terjadi bahkan meningkat apabila penduduknya masih belum dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada (Nurchayyo, 2021). Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vo et al. (2024) tentang efek jangka panjang dan jangka pendek dari modal manusia pada ketimpangan yang ada di kawasan ASEAN. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam jangka panjang modal manusia dapat meningkatkan kesenjangan di negara-negara tersebut.

Jika melihat perkembangan kualitas SDM yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh wilayah tergolong memiliki rata-rata IPM yang tinggi dan tidak ada perbedaan yang cukup mencolok antara capaian IPM di tiap kabupaten/kota. Dengan demikian, hasil uji yang menunjukkan adanya pengaruh positif kualitas SDM terhadap ketimpangan mengindikasikan bahwa persoalannya tidak semata-mata terletak pada angka IPM yang dihasilkan, tetapi berkaitan juga dengan distribusi komponen penyusun IPM itu sendiri seperti, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita.

Secara teoritis, peningkatan kualitas SDM seharusnya berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Teori Human Capital juga menjelaskan bahwa investasi dalam modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan individu dapat meningkatkan produktivitas dalam

perekonomian. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak selalu disertai dengan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas SDM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sejalan dengan penurunan ketimpangan di wilayah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam perhitungan IPM ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Tiap wilayah bisa saja menonjol pada dimensi yang berbeda. Misalnya, Gunungkidul unggul dalam aspek kesehatan seperti harapan hidup, tetapi masih tertinggal dalam aspek pendidikan atau daya beli masyarakat. Sebaliknya, Kota Yogyakarta dan Sleman unggul di semua dimensi, terutama dalam segi pendidikan dan ekonomi. Kabupaten Bantul memiliki capaian IPM yang juga relatif tinggi, namun laju pertumbuhan ekonominya masih tergolong lambat, yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong terjadinya produktivitas di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kabupaten Kulonprogo menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun capaian IPM-nya berada di bawah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa muncul ketika hanya wilayah-wilayah tertentu yang mampu memanfaatkan peningkatan IPM untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya secara nyata, sementara wilayah lain mengalami peningkatan IPM pada dimensi-dimensi yang kurang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi.

- Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar -0.616 dan nilai signifikansi sebesar 0.541 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara parsial variabel Investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Didia, (2016). Dalam penelitian yang menganalisis ketimpangan pembangunan di kawasan kedungsepur tersebut menemukan bahwa investasi berhubungan negatif namun tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh karena investasi yang masuk ke suatu wilayah cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu tanpa tersebar secara merata ke wilayah sekitarnya.

Akibatnya meskipun nilai investasi secara keseluruhan meningkat, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan menjadi terbatas karena manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Menurut hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memicu tumbuhnya investasi di daerah masih perlu ditingkatkan lagi yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Hal ini juga didukung oleh temuan Julihanza & Khoirudin, (2023). Dalam penelitian mereka yang menguji pengaruh secara parsial variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh Provinsi Sumatera ditemukan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan di wilayah. Hal ini dijelaskan oleh dua faktor utama, pertama investasi masih terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu, sehingga tidak seluruh provinsi menikmati manfaat yang sama. Kedua, investasi asing maupun domestik tidak merata pada sektor kapital-intensif yang tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal atau meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah wilayah yang paling banyak menerima investasi. Peningkatan investasi di kedua wilayah tersebut cukup stabil dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan kedua wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, jasa, dan pariwisata. Banyak pusat perbelanjaan, kampus besar, dan fasilitas kesehatan tumbuh pesat di wilayah ini, menjadikannya sebagai tujuan utama bagi para investor untuk berinvestasi. Sementara itu, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo lebih sedikit menerima investasi dan peningkatannya tidak terlalu signifikan tiap tahunnya. Meskipun Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 sempat mengalami lonjakan investasi yang besar karena adanya proyek pembangunan Bandara namun investasi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak berlanjut secara konsisten di tahun-tahun selanjutnya. Kabupaten dengan tingkat realisasi investasi paling rendah dan cenderung stagnan tiap tahunnya adalah Gunungkidul. Investasi yang tidak merata di tiap wilayah dan cenderung semakin meningkat di wilayah yang sudah berkembang ini akan menyebabkan wilayah yang sudah berkembang tersebut akan semakin tumbuh sedangkan daerah yang tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalannya dan ini akan menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar.

- Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.088 dan nilai signifikansi sebesar 0.930 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara

parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Mansyur et al., (2021) yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak dapat memberikan pengaruh yang bermakna terhadap ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi ekonomi yang hanya terjadi di wilayah-wilayah maju, seperti pusat kota atau daerah dengan infrastruktur yang lebih berkembang. Sementara itu, wilayah tertinggal tidak mendapatkan manfaat yang sebanding, sehingga pertumbuhan yang terjadi tidak mampu mengurangi ketimpangan secara menyeluruh.

Tidak adanya pengaruh signifikan variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara parsial bisa terjadi karena daerah atau wilayah dengan pertumbuhan tinggi belum tentu mengalami penurunan ketimpangan. Ketimpangan tetap terjadi karena tidak adanya distribusi manfaat pertumbuhan yang merata ke seluruh wilayah. Selain itu, ketergantungan wilayah pinggiran pada sektor-sektor rentan, seperti pertanian dan pariwisata musiman dapat memperkuat ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain, pertumbuhan yang hanya meningkat di daerah tertentu tidak cukup untuk mengurangi ketimpangan jika tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses ekonomi secara merata di wilayah tertinggal.

Selain itu, tidak signifikkannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan juga dapat dijelaskan dari konteks waktu pengamatan data yang mencakup masa pandemi COVID-19. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah menjadi tidak stabil karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan guncangan di berbagai sektor, terutama pariwisata dan jasa yang menjadi andalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kondisi riil pemerataan pendapatan.

- Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.242 dan nilai signifikansi sebesar 0.810 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa

secara parsial variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bila dilihat dari kondisi nyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pengangguran cenderung tinggi di wilayah yang sudah maju seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena tingginya arus urbanisasi dan adanya lembaga perguruan tinggi yang memunculkan banyak pekerja baru dari lulusan perguruan tinggi. Banyak dari mereka yang belum terserap secara langsung di pasar kerja hal ini menyebabkan angka pengangguran di kedua wilayah tersebut cukup tinggi. Namun, kedua wilayah ini justru tergolong wilayah yang maju secara ekonomi sehingga pengangguran di sini tidak serta merta langsung mencerminkan ketimpangan yang tinggi. Sementara itu, kabupaten Bantul angka pengangguran tidak terlalu tinggi tetapi kondisi ketenagakerjaan di sana belum sepenuhnya stabil atau produktif secara ekonomi, sehingga pengaruhnya terhadap ketimpangan tidak terlalu terlihat. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, tingkat pengangguran relatif rendah. Akan tetapi, rendahnya tingkat pengangguran tersebut seringkali disebabkan oleh dominasi sektor informal seperti pertanian dan pekerjaan tidak tetap, bukan karena adanya lapangan kerja formal yang memadai. Banyak penduduk yang bekerja secara tidak penuh atau *underemployment* sehingga tidak masuk ke dalam kategori pengangguran terbuka, tetapi masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, angka pengangguran yang rendah di wilayah ini juga tidak dapat dijadikan indikator mutlak bahwa ketimpangan di sana kecil karena tingkat penganggurannya rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran terbuka sendiri memang belum cukup untuk menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka belum sepenuhnya mencerminkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tidak memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas ketenagakerjaan, jenis pekerjaan, dan dominasi sektor informal di masing-masing kabupaten kota.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istikharoh et al., (2018). Dalam penelitiannya, pada hasil uji parsial pengaruh variabel tingkat pengangguran terhadap ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018. Menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari uji pengaruh parsial variabel Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai t sebesar 0.637 dan nilai signifikansi sebesar 0.528 (>0.05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa secara parsial variabel upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliana & Soelistyo, (2019) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM dan upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Dalam hasil penelitian ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum dalam mengurangi ketimpangan sangat tergantung pada struktur ekonomi wilayah, dominasi sektor informal, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengupahan. Di daerah yang didominasi sektor informal. Kebijakan upah minimum cenderung tidak berdampak luas karena banyak pekerja tidak terikat aturan tersebut.

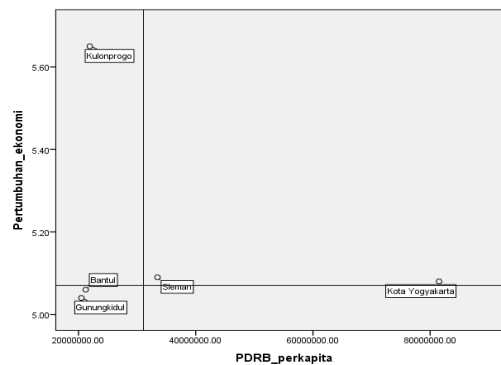
Hal yang sama terlihat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah seperti Kota Yogyakarta dan Sleman memiliki sektor formal yang lebih berkembang sehingga kenaikan upah minimum lebih terasa. Namun di wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, sektor informal masih sangat dominan, terutama di bidang pertanian dan usaha mikro. Akibatnya, banyak pekerja yang tidak menerima upah sesuai ketentuan, sehingga kenaikan upah minimum tidak merata dampaknya. Dengan demikian tingginya proporsi pekerja informal dan ketimpangan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang membuat variabel upah minimum tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis Tipologi Klassen.

Tabel 8. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Rata-rata PDRB Per kapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kulonprogo	21,918,310	5,65
Bantul	21,224,000	5,06
Gunungkidul	20.485.500	5,04
Sleman	33.475.000	5,09
Kota Yogyakarta	81.522.500	5,08
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	31,784,000	5,07

Berdasarkan data PDRB per kapita dan laju pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota pada tabel 8, maka hasil analisis tipologi klasen untuk menentukan tingkat kemajuan masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut.



Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan SPSS

Gambar 1 Matriks Tipologi Klasen Berdasarkan PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupatenn/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan gambar matriks 1, diperoleh hasil pengelompokkan Tipologi Klasen sebagai berikut.

- Kuadran I (Daerah Maju dan Cepat Tumbuh)

Daerah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kedua daerah ini termasuk ke dalam kategori daerah yang maju dan cepat tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan PDRB per kapita juga di atas rata-rata provinsi.

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Yogyakarta memiliki struktur ekonomi yang kuat, terutama di sektor pengolahan, jasa, perdagangan, dan pendidikan tinggi. Hal ini mendorong tingkat PDRB per kapita yang tinggi pada wilayah tersebut. Kabupaten Sleman juga menunjukkan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sleman berada di atas rata-rata provinsi, didukung oleh sektor perdagangan besar dan kecil, *real estate*, serta akomodasi dan jasa makanan minuman. Kabupaten ini juga diuntungkan dengan adanya kawasan pendidikan, pusat perdagangan dan menjadi lokasi dengan destinasi wisata yang terkenal seperti Candi Prambanan dan Kaliurang. Selain itu, infrastruktur yang lebih maju dan konektivitas antarkedua wilayah menjadikan kedua wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- **Kuadran II (Daerah Berkembang Cepat)**

Daerah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori daerah berkembang cepat dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi, namun PDRB per kapita masih di bawah rata-rata provinsi. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan proyek-proyek besar yang dilaksanakan di wilayah tersebut seperti proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan lintas selatan pembangunan kawasan industri Sentolo. Namun, PDRB per kapita yang masih rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.

- **Kuadran IV (Daerah Relatif Tertinggal)**

Wilayah yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Kedua wilayah ini termasuk ke dalam kategori wilayah relatif tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita yang juga rendah. Kabupaten Gunungkidul memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam dan secara geografis wilayah ini didominasi oleh kawasan karst atau pegunungan kapur yang tandus dan kurang air sehingga kurang mendukung adanya kegiatan pertanian produktif konvensional. Kondisi ini berdampak pada perlambatan pengembangan sektor pertanian, yang sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kabupaten Bantul masuk ke dalam kategori wilayah relatif tertinggal karena masih sangat bergantung pada industri kecil tradisional seperti kerajinan tangan, kuliner, dan industri kreatif berbasis masyarakat. Meskipun sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada ekspor, produktivitas dan nilai tambahnya cukup rendah dibandingkan dengan industri modern yang besar. Hal ini membatasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

4. KESIMPULAN

- Kualitas SDM, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum Secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kualitas SDM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Berdasarkan hasil analisis pendekatan Tipologi Klassen, penelitian ini berhasil mengkategorikan posisi masing-masing wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam empat kuadran berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Hasil klasifikasi ini memperlihatkan ketimpangan distribusi pendapatan secara nyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk ke dalam kuadran I, yaitu daerah maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam kuadran II, yaitu daerah berkembang. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masuk ke dalam daerah yang relatif tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, G., Arifa'ilah, I., Elvina, S., S, I., & T, A. (2016). POLA SPASIAL INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 5(2), 158 -170. <https://doi.org/10.24252/jpm.v5i2.1579>
- Aktas, E. E., & Iyidogan, P. V. (2022). Nonlinear effects of income inequality on economic growth: A comparative analysis of selected countries. *Economic Journal of Emerging Markets*, 14(April), 72–84. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol14.iss1.art6>
- Aprilianti, V. A., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. BPCF.
- Awaludin, D., Sasana, H., & Prakosos, J. A. (2021). Analisis Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. *Dinamic : Directory Journal of Economic*, 3(1), 14–35.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Laju pertumbuhan produk domestik bruto atas harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota di DI Yogyakarta (2014-2023)*. <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Penanaman modal dalam negeri dan asing menurut kabupaten/kota (miliar rupiah) 2014-2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Upah minimum Provinsi DI Yogyakarta 2014-2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2017). *Indeks pembangunan manusia Daerah*

- Istimewa Yogyakarta 2020. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2018). *Indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2020). *Indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022). *Indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2023). *Indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2023*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2024). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2024* (Vol. 46). BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
<https://yogyakarta.bps.go.id>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*.
- Breau, S., & Saillant, R. (2016). Regional income disparities in Canada: Exploring the geographical dimensions of an old debate. *Regional Studies, Regional Science*, 3(1), 463–481. <https://doi.org/10.1080/21681376.2016.1244774>
- Cita, F. P. (2016). Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2).
<https://doi.org/10.37673/jebi.v1i2.43>
- Daňová, M., & Vozárová, I. K. (2020). Regional disparities in the relationship between economic growth and unemployment. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(2), 1–9.
<https://doi.org/10.46585/sp28020900>
- Darda, T., Patra, I. ketut, & Mustafa, S. wahyuni. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Kabupaten Luwu Tahun 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 176–182. <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i2.5500>
- Dhiya, M., & Negara, S. (2024). *Economic Growth , Poverty , Unemployment , and the Human Development Index (HDI) in Mitigating Socio-economic Disparities in North Sumatra (2019-2023) : An Econometric Case Study*. 21(12), 302–311.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Deveopment Anaysis Journal*, 5(1), 101–108.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Estrada & Wenagama. (2019). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 8, 1637–1665.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. (2024). *Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023*. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 623–633. <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>

- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125.
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93>
- Jumasrah. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Swasta Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar Tahun 2003-2016. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), 64–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1440361>
- Karountzos, P., Giannakopoulos, N. T., Sakas, D. P., Efthalitsidou, K. I., & Migkos, S. P. (2024). GINI's Odyssey in Greece: Econometric Analysis of Income Inequality, GDP, and Unemployment Through Economic Phases (Pre-Crisis, Crisis, Memoranda, and Post-Memoranda). *International Journal of Financial Studies*, 12(4), 1–19. <https://doi.org/10.3390/ijfs12040129>
- Katon Prasetyo Wibowo, & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 539–549. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.06>
- Mdingi, K., & Ho, S. Y. (2023). Income inequality and economic growth: An empirical investigation in South Africa. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2230027>
- Mudana, I. W. E., & Purbadharmaja, I. B. P. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9601–9612. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31044>
- Nurchahyo, A. M. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Jawa Timur
- Peters, K., Jetten, J., Tanjitpiyanond, P., Wang, Z., Mols, F., & Verkuyten, M. (2022). The Language of Inequality: Evidence Economic Inequality Increases Wealth Category Salience. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 48(8), 1204–1219. <https://doi.org/10.1177/01461672211036627>
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779>
- Putra, L. A. P. (2018). Analisis Pengaruh TPAK Wanita, PDRB Perkapita, IPM Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2016. *Jurnal Ilmiah*.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>

- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.3.244-257>
- Rachmatullah, R., Pratama, I. N., Kholishoh, L., Gunawan, S., Widiawati, L., Handayani, A., & Anwar, C. (2023). *Foreign Direct Investment and Regional Inequality in Banten Province*. <https://doi.org/10.4108/cai.4-11-2022.2329793>
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Inequality Model of Economic Development in Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(28), 257–270. <https://doi.org/10.33059/jseb>.
- Ramadhan, A. (2020). *Pengaruh PDRB, IPM, dan Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2017* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/41986>
- Rammelt, C. (2018). Infrastructures as catalysts: Precipitating uneven patterns of development from large-scale infrastructure investments. *Sustainability (Switzerland)*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/su10041286>
- Ridwan & Nawir, I.S. (2021). *Ekonomi Publik*. 1(1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ryansyah, Hasibuan, R. R. A., & Daulay, N. A. (2023). Pendekatan Index Williamson Dan Tipologi Klassen Dalam Menganalisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Dalam Upaya Mewujudkan SDGs Di Sumatera Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 1285–1295. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Sanjaya, I. G. A., & Saskara, I. A. N. (2022). Pengaruh Upah Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(9), 3523. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i09.p08>
- Santosa, S. H. (2015). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan Iv Propinsi Jawa Timur. *Media Trend*, 10(2), 138–155. <http://mediatrend.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/943>
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(2), 169–180. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.182>
- Shen, C., & Zhao, X. (2023). How does income inequality affects economic growth at different income levels? *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 36(1), 864–884. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080742>
- Sinik, F., & Robertus, M. (2023). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, INVESTASI, DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2021*. 12(4), 59–71.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. LP3ES.
- Soava, G., Mehedintu, A., & Sterpu, M. (2020). Relations between income inequality, economic growth and poverty threshold: New evidences from eu countries panels. *Technological and Economic Development of Economy*, 26(2), 290–310. <https://doi.org/10.3846/tede.2019.11335>

- Sondakh, C. A. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan KualitasPertumbuhan Ekonomi Empat Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–11.
- Sri Hartati, Y. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Sukirno, S. (1995). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Sukirno, S. (2002). *Ekonomi Pembangunan : Proses, masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*.
- Sukirno, S. (2016). *Sadono Sukirno. 2016. Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sulistiyawati, D. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004–2013. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 172–183. <https://doi.org/10.20961/jiep.v15i2.21043>
- Sumarsono, Sonny. 2014. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>
- Syaifudin, R., Salman Alfarisi, M., Stephanie Regina Putri, G., Abdul Jabbar, M., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012-2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(2), 129–137. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5143>
- Syaifullah, D. R., & Sari, D. M. (2021). Dekomposisi Ketimpangan Pendapatan Dan Determinan Posisi Ekonomi. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 125–140. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.262>
- Todaro, P. M., & Smith, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Tyas, N. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Vo, D. H., Nguyen, T. C., Tran, N. P., & Vo, A. T. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010040>
- Vo, D. H., Vo, A. T., & Ho, C. M. (2024). The short- and long-run effect of human capital on income inequality: Empirical evidence in the ASEAN region. *PLoS ONE*, 19(7 July), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304678>